

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, laporan keuangan pemerintah merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik di pemerintah pusat maupun daerah.¹ Semakin besarnya tuntutan terhadap akuntabilitas publik menyebabkan sebuah implikasi bagi pihak manajemen pemerintah untuk menyampaikan informasi keuangan yang berkualitas kepada publik.² Informasi pelaporan keuangan akan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan apabila pemangku kepentingan melihat laporan keuangan dari segi formalitas dan segi substansinya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa laporan keuangan telah lama dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah daerah akan berkualitas apabila penerapannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.³ Laporan keuangan adalah media bagi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya untuk publik, sehingga laporan keuangan yang disajikan pemerintah menghasilkan

¹ Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 11, no. 2 (2020): 170–78, <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>.

² Ucik Aisyah Putri, Hafidhah, dan Imam Darul Firmansyah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Sumenep," *JAFIS: Journal of Accounting and Financial Issue* 1, no. 1 (2020): 11–19, <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1202>.

³ Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan," *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 2 (2018): 8–17.

informasi keuangan yang berkualitas.⁴ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang mencerminkan taat pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib administrasi dan tertib asas.⁵

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan memenuhi dasar kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas transparansi, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Asas transparansi dan asas akuntabilitas adalah dua faktor kunci dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Asas transparansi dan akuntabilitas memiliki keterikatan karena tanpa transparansi tidak mungkin terdapat akuntabilitas dan transparansi tidak bermanfaat tanpa didukung oleh asas akuntabilitas.

Asas transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi mengenai keuangan yang terbuka dan amanah kepada publik, berdasarkan asas tersebut masyarakat (prinsipal) memiliki hak untuk mengetahui secara penuh dan terbuka dalam pertanggungjawaban pemerintah (agen) atas pengelolaan informasi keuangan, sumber daya yang dipercayakan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan pemerintah.⁶ Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh informasi terkait proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan informasi yang disajikan harus memadai supaya mudah dipahami. Berdasarkan hal tersebut dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada

⁴ Harry Apriansyah, Sri Rahayu, dan Misni Erwati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo,” *JAR: Jambi Accounting Review* 1, no. 1 (2020): 44–62, <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/10944>.

⁵ Mega Andani Putri, Maryono, dan Batara Daniel Bagana, “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang,” *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 6, no. 2 (2017): 153–63.

⁶ Budhi Purwantoro Jati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Wahana* 21, no. 1 (2019): 1–14.

pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Asas akuntabilitas publik diartikan sebagai wujud kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) dalam menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang mempunyai hak serta kewenangan untuk menghendaki pertanggungjawaban tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan komitmen politik akan akuntabilitas. Pedoman tingkah laku, sistem pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta sistem pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas termasuk dalam instrumen pendukung akuntabilitas.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP Nomor 1 Paragraf 9 menjelaskan bahwa “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.⁸ Laporan keuangan disusun oleh suatu entitas pelaporan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari tujuh komponen, yaitu neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.⁹ Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah sebagai agen harus

⁷ Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, dan Adhi Alfian, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi: Konsep Dan Aplikasi*, ed. oleh Rendy Laily Kim, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=XtjuDwAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PP1&focus=viewport&dq=pemerintah+daerah&hl=id>.

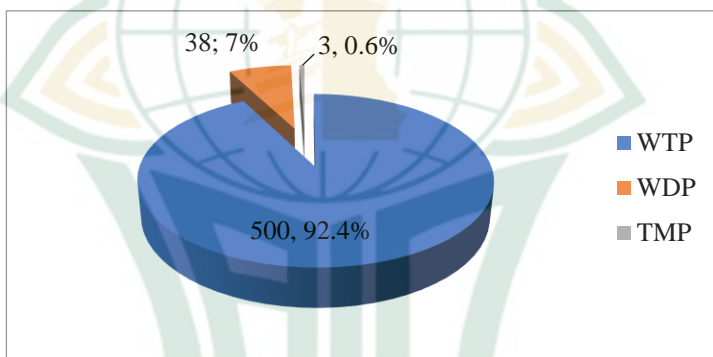
⁸ Siti Hasanah dan Tapi Rumondang Sari Siregar, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu,” *JAKPI: Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 9, no. 1 (2021): 38–47.

⁹ Irzal Tawaqal dan Suparno, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian *Internal*, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh,” *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 2, no. 4 (2017): 125–35.

berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dengan laporan sebelumnya, dan mudah dipahami.¹⁰

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dari kumpulan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertugas sebagai eksekutif untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan agar berjalan secara optimal, sehingga setiap OPD diwajibkan menyusun laporan keuangan.¹¹ Setiap tahun laporan keuangan pemerintah daerah akan dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), apabila BPK melakukan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD bisa diartikan laporan keuangan suatu entitas disajikan dan dapat dikatakan wajar dan berkualitas.¹²

Gambar 1. 1 Grafik Opini BPK atas LKPD Tahun 2021



¹⁰ Khairunnas, Teguh Erawati, dan Anita Primastiwi, “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 483–97.

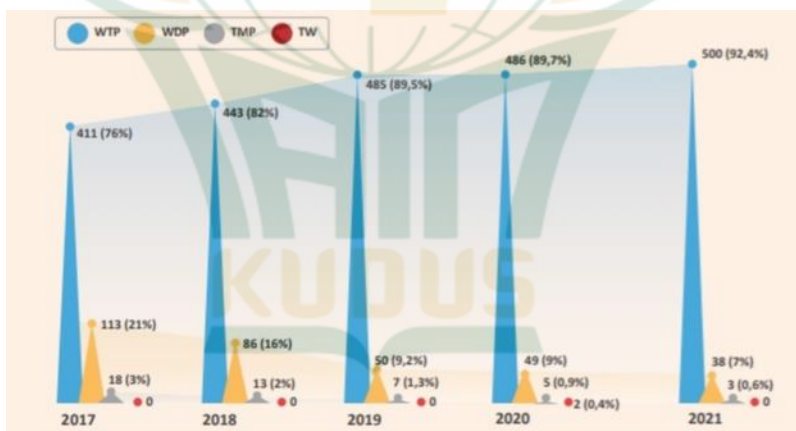
¹¹ Nanik Ermawati dan Nurul Rizka Arumsari, “Determinan Kinerja Manajerial Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus,” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 63–84.

¹² Hengky Orlanda, Muhammad Gowon, dan Misni Erwati, “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas-dinas Di Provinsi Jambi),” *JAR: Jambi Accounting Review* 1, no. 2 (2020): 165–83, <https://onlinejournal.unja.ac.id/JAR/I>.

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang resmi diterbitkan oleh BPK, melakukan pemeriksaan atas 541 LKPD Tahun 2021 dari 542 pemerintah daerah yang diharuskan melakukan penyusunan atas laporan keuangan tahun 2021. Terdapat 1 pemerintah daerah yang belum melaporkan laporan keuangan kepada BPK, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Grafik 1.1 menjelaskan data hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD tahun 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 LKPD, artinya masih terdapat permasalahan dalam penyusunan LKPD. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, LKPD tahun 2021 yang mendapatkan opini WTP mengalami kenaikan. Pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 terdapat 486 dari 542 LKPD mendapatkan penilaian opini WTP, opini WDP dari 49 LKPD, opini TMP dari 5 LKPD, dan opini TW dari 2 LKPD.

Gambar 1. 2 Perkembangan Opini LKPD (2017-2021)



Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan LKPD dalam lima tahun terakhir (2017-2021) terhadap penilaian opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang mendapatkan opini WTP naik sebesar 16,4%, yaitu dari 76% atas LKPD tahun 2017 menjadi 92,4% atas LKPD tahun 2021. Sementara itu, LKPD yang mendapatkan opini WDP menurun sebesar 14% dari 21% pada LKPD tahun 2017 menjadi 7% pada LKPD tahun 2021. LKPD yang memperoleh kategori TMP juga mengalami penurunan

sebesar 2,4%, dimana LKPD tahun 2017 memperoleh 3% menjadi 0,6% pada LKPD tahun 2021 dan LKPD yang mendapatkan kategori TW selama lima periode (2017-2021) hanya pada LKPD tahun 2020 sebanyak 2 pemerintah daerah.

Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD tahun 2021 terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dan ditindaklanjuti setiap daerah. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada pemerintah yang mendapatkan opini WDP, opini TMP, dan opini TW. Temuan permasalahan juga dapat muncul pada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP, maka setiap daerah diharuskan memperbaiki LKPD dengan melihat temuan-temuan permasalahan yang ada.

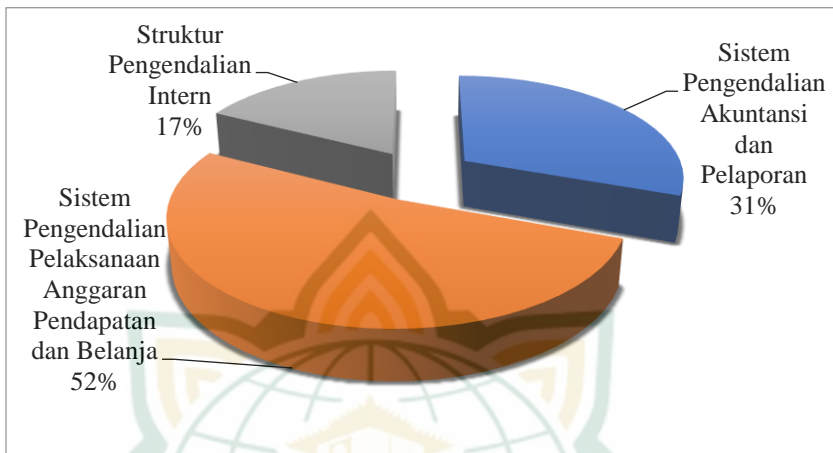
Tabel 1. 1 Permasalahan Ketidaksesuaian Penyajian Akun dengan SAP pada LKPD Tahun 2021

Nama Akun	Jumlah PEMDA yang Melakukan Kesalahan
Aset Lancar	20
Aset Tetap	20
Aset Lainnya	17
Belanja Operasi	14
Belanja Modal	22

Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa permasalahan terbesar ketidaksesuaian penyajian akun dalam LKPD tahun 2021 dengan SAP terletak pada belanja modal. Temuan permasalahan yang terjadi dalam penyajian akun belanja modal, yaitu terdapat pembayaran atas belanja modal yang berlebihan, realisasi belanja modal tanah pada ganti rugi lahan dilakukan tidak menurut ketentuan, realisasi belanja modal atas JIJ digunakan untuk membayar utang yang tidak terdapat dukungan dari pengujian ketepatan spesifikasi pekerjaan, pemerintah daerah belum menerima barang atas pengadaan, dan realisasi belanja modal lebih besar dari realisasi fisik. Selain itu, ketidaksesuaian penyajian dengan SAP terendah berada pada belanja operasi. Permasalahan yang terjadi pada akun belanja operasi yaitu tidak tepat sasaran realisasi belanja bantuan sosial dan tanpa adanya dukungan bentuk tanggungjawab yang memadai, realisasi belanja barang dan jasa yang berlebihan dalam pembayaran yang belum dikembalikan ke kas daerah, realisasi belanja pegawai tidak terdapat pertanggungjawaban yang memadai, dan potongan pajak penghasilan belum disetor ke kas negara.

Gambar 1. 3 Grafik Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI LKPD 2021



Sumber: IHPS Semester I Tahun 2022

Berdasarkan hasil penilaian BPK terhadap 541 LKPD tahun 2021 mengutarakan adanya 6.965 temuan yang mengandung 11.910 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Permasalahan lemahnya SPI sebesar 5.366 dan ketidakpatuhan perundang-undangan sebesar 6.544. Dilihat dari Grafik 1.2 terdapat permasalahan kelemahan SPI, yaitu permasalahan melemahnya sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 1.637 (31%), kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebesar 2.791 (52%), dan permasalahan lemahnya struktur pengendalian intern sebesar 938 (17%).¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 Ayat 1 menegaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan SPI menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Terkait persoalan pengendalian intern, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

¹³ Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia, "IHPS I Tahun 2022," *BPK RI* (Indonesia, 2022), <https://www.bpk.go.id/ihips/2022/I>.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah" (2006).

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dengan memaksimalkan SPIP diharapkan SPI semakin efektif sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.¹⁵

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses terkonsolidasi dari tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka menciptakan kepercayaan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.¹⁶ Menurut I Gusti Ageng Rai yang dikutip dari Riedy Riandani menjelaskan pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen agar organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.¹⁷ Penerapan sistem pengendalian intern memiliki tujuan untuk melakukan pengecekan ketelitian dan keterandalan data akuntansi, dikarenakan pengendalian intern salah satu bagian sistem informasi akuntansi yang dapat mempermudah pekerjaan sistem informasi tersebut.¹⁸

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas OPD. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan memacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dibidang akuntansi merupakan

¹⁵ Zelda Triyani dan Chara Pratami T. Tubarad, “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah,” *JAK: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 23, no. 1 (2018): 11–30.

¹⁶ Arina Roshanti, Edy Sujana, dan Kadek Sinarwati, “Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Akuntansi Program SI Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 1 (2014).

¹⁷ Riedy Riandani, “Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Limapuluh Kota),” 2017, 1–46, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2395>.

¹⁸ Medy Syari Khalifah Anggari Raharjo, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Peran Inspektorat Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kota Malang),” 2017, 1–18.

penggerak pertama tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas, artinya kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah.¹⁹ Sesuai dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan adanya bentuk kerjasama antara agen dan prinsipal, dimana agen yang diberi tanggungjawab dan berkewajiban melakukan pencatatan, melaporkan dan menyampaikan segala aktivitas yang merupakan tanggungjawabnya kepada prinsipal. Keterikatan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*), teori ini menjelaskan pemerintah daerah (agen) harus memenuhi kebutuhan masyarakat (prinsipal) untuk menghasilkan keuangan yang berkualitas supaya mempermudah prinsipal dalam mengambil keputusan.²⁰

Disamping faktor SPI dan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi erat kaitannya dengan kualitas laporan keuangan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dimanfaatkan pemerintah untuk pengelolaan keuangan. Widjajanto dikutip dari Edy Sujana dan Kadek Sinarwati menyatakan bahwa secara garis besar manfaat yang ditawarkan teknologi informasi adalah berupa kecepatan pemrosesan data transaksi dan membantu menyiapkan laporan. Selain itu, dapat menyimpan data cukup besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, kecurangan, dan lebih rendahnya biaya pemrosesan. Pemanfaatan teknologi yang baik, diharapkan akan meningkatkan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan laporan keuangan.²¹

Kabupaten Kudus merupakan salah satu provinsi Jawa Tengah yang melakukan penyusunan LKPD. Kualitas laporan keuangan Kabupaten Kudus termasuk kategori cukup baik. Seperti dilansir dalam <https://jatengprov.go.id> pemerintah daerah Kabupaten Kudus

¹⁹ Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual),” *STIE Semarang* 5, no. 3 (2013): 93–111.

²⁰ I Made Hendra Setiawan dan Ni Ketut Rasmini, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Pegawai Pada Kualitas Laporan Keuangan,” *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 5 (2021): 1331–43, <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p19>.

²¹ Edy Sujana dan Kadek Sinarwati, “Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

tahun 2022 mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-10 kalinya secara berturut-turut atas LKPD tahun 2021.²² Kemampuan Kabupaten Kudus dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 tahun (2012-2021) berturut-turut tentu menarik untuk dipelajari. Walaupun mendapatkan kategori opini WTP, LKPD Kabupaten Kudus masih terdapat temuan-temuan permasalahan.

Tabel 1. 2 Temuan Permasalahan LKPD Kabupaten Kudus

No.	LKPD (Tahun)	Permasalahan	Temuan
1	2017	Sistem Pengendalian Intern	a. Melemahnya penatausahaan aset tetap yang belum memadai, yaitu terdapat perbedaan informasi atas luas tanah jalan berdasarkan SK jalan tahun 2015 dengan KIB A Dinas PUPR, adanya bangunan yang tercatat tidak wajar di KIB C, aset jalan untuk tambahan ruas jalan berdasarkan SK jalan tahun 2015 sebagian belum dicatat di KIB D, serta jumlah jembatan berbeda dengan <i>database</i> jembatan. Selain itu, adanya temuan aset tetap yang berupa buku yang belum dirinci pada 4 OPD sebesar 1,28 M, BMD yang tercatat sebagai KDP tidak memenuhi definisi KDP di 7 OPD, sisa BMD hasil validasi dan verifikasi yang belum selesai ditindaklanjuti tercatat di aset lainnya 99

²² “Pemkab Kudus Raih WTP Kali Kesepuluh Berturut-turut Hartopo Harapkan Mampu Jadi Pelecut Semangat Perbaikan Birokrasi,” Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 24 Mei, 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/raih-wtp-kali-kesepuluh-berturut-turut-hartopo-harapkan-mampu-jadi-pelecut-semangat-perbaikan-birokrasi/>.

			<p>sekolah sebesar Rp 957,33 juta.</p> <p>b. Belum didukungnya bukti penyerahan aset secara tertulis pada aset lainnya, yaitu terdapat aset sumur dan jaringan air bersih yang berlokasi di penduduk pada Dinas PUPR, Dinas Pertanian menyajikan saldo aset lainnya belum terdapat dukungan bukti penyerahan aset secara tertulis, Dinas Tenaga Kerja mencatat aset yang dipinjamkan tetapi sudah dikuasai masyarakat.</p>
		<p>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan</p>	<p>a. Terhadap subjek pajak yang memenuhi persyaratan belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah, diantaranya terdapat pengusaha pemasang reklame yang tidak terdaftar sebagai WP reklame, terdapat pengusaha restoran belum terdaftar sebagai WP restoran, serta belum terintegrasi pengelolaan PBB, IMB, dan BPHTB.</p> <p>b. Pelaksanaan tujuh paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa di 3 OPD, yaitu berupa pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan PKL kawasan Colo tidak berlandaskan perencanaan yang memadai, dan kelebihan pembayaran atas 6 paket pekerjaan di Dinas PUPR, DISDAG, dan DISDIKPORA sebanyak Rp 146,89 juta.</p>

2	2018	Sistem Penge ndalia n Intern	<p>a. Pengamanan dan pemanfaatan aset tetap belum sesuai ketentuan, yaitu tanah sebesar Rp 594,06 M belum bersertifikat dan bersertifikat atas nama individu, tanah sebesar Rp 82,30 juta dipergunakan masyarakat tanpa perjanjian, serta 19 bangunan pasar sebesar 119,20 M tanpa didukung surat perjanjian.</p> <p>b. Pengelolaan persediaan 7 OPD tidak tertib, salah satunya Dinas Kesehatan yang tidak setiap penerimaan barang ATK dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang, yaitu tidak ada catatan atas mutasi persediaan, tidak ada kartu persediaan dan nota/bon permintaan barang, serta SOP pengelolaan persediaan.</p>
		Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	<p>a. Realisasi pendapatan sebesar Rp 91,45 juta dan belanja sebesar Rp 1,10 M di Kelurahan Mlati Norowito tidak sesuai ketentuan, yaitu pendapatan lelang sawah pertanian bondo deso kurang disetor ke kas daerah sebesar Rp 111,73 juta, pemakaian kekayaan daerah berupa kios, tanah, dan lahan parkir tidak dilengkapi dengan perjanjian sewa, serta tunggakan PBB-P2 atas 22 objek pajak sebesar Rp 24,43 juta belum dibayar.</p> <p>b. Pemkab Kudus belum dapat menyelesaikan peralihan hak aset kemitraan dengan pihak</p>

			ke 3 atas renovasi pasar Jember dan pasar Bitingan sebesar Rp 32,46 M.
3	2019	Sistem Penge ndalian Intern	<p>a. Dinas Perhubungan belum optimal dalam mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum.</p> <p>b. Penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, DUKCAPIL dan bagian pengadaan barang dan jasa sekretaris daerah belum tertib.</p>
		Ketid akpatuhan terhadap ketent uan perun dang- undan gan	<p>a. 10 paket pekerjaan pada sekretaris daerah, Dinas PUPR, serta Dinas Kesehatan kekurangan volume sebanyak Rp 198,03 juta.</p> <p>b. Pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Sidomulyo-Gondoharum sebanyak Rp 1.495,60 juta dan pembangunan saluran drainase pembuangan greng Kecamatan Mejobo sebesar Rp 783,32 juta dilakukan mendahului selesainya pekerjaan.</p>
4	2020	Sistem Penge ndalian Intern dan Ketid akpatuhan terhadap ap ketent uan perun	<p>a. Penatausahaan pendapatan retribusi pada Dinas Perdagangan tidak tertib yang mengakibatkan pendapatan kurang disetor Rp 100,13 juta dan tunggakan retribusi sebesar Rp 253,23 juta tidak dapat disajikan sebagai piutang.</p> <p>b. Belum dilaksanakanya secara tertib pada penatausahaan aset tetap yang mengakibatkan aset tetap tanah dan aset tetap jalan belum termasuk aset</p>

		dang- undan gan	tetap tanah dan jalan di 4 Kelurahan.
5	2021	Sistem Penge ndalia n Intern dan Ketid akpat uhan	<p>a. Tidak tertibnya penatausahaan pendapatan retribusi di Dinas Perdagangan yang dapat mengakibatkan pendapatan retribusi yang diterima secara tunai dan yang disetorkan tidak tepat waktu ke kas daerah berisiko disalahgunakan.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah tidak tertib yang menyebabkan realisasi belanja hibah kepada KONI sebesar Rp 423,67 juta tidak lengkap dan tidak dapat diyakini keberadaanya dan berisiko disalahgunakan.</p>

Sumber: <https://kuduskab.go.id/category/keuangan>

Tabel 1.2 menjelaskan adanya temuan-temuan permasalahan yang terjadi pada LKPD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2017-2021. BPK menemukan permasalahan selama 5 tahun terakhir pada LKPD Kabupaten Kudus yaitu, BPK menemukan lemahnya pada sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di beberapa

akun, seperti akun aset tetap dan akun aset lainnya. Temuan-temuan permasalahan laporan keuangan yang disusun setiap tahunnya harus diperbaiki karena penilaian opini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian penyajian akun dengan SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan pada aturan perundang-undangan, serta SPI yang efektif. Apabila kriteria yang terpenuhi semakin banyak, maka penilaian opini yang diperoleh semakin tinggi. Permasalahan pada LKPD Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir harus diperbaiki karena kelemahan ketidakefektifan SPI dan tidakpatuhan pada perundang-undangan dapat mempengaruhi kegagalan pemberian opini WTP. Selain dapat mempengaruhi kegagalan pemberian opini WTP juga dapat mempengaruhi rendahnya capaian penilaian opini. Jadi, semua temuan permasalahan yang terjadi di OPD atas LKPD di Kabupaten Kudus harus diperbaiki meski mendapatkan kategori WTP, supaya LKPD tahun berikutnya mendapatkan opini WTP dengan capaian penilaian yang diharapkan yaitu diatas 90% dan tidak ditemukan permasalahan pada LKPD selanjutnya, dalam artian mencapai target yang diharapkan tanpa ada catatan audit dari BPK.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD, hanya ada 9 LKPD di Provinsi Jawa Tengah yang mampu mempertahankan opini WTP dalam 10 tahun berturut-turut, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Surakarta, artinya terdapat sekitar 26% dari 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mampu mempertahankan Opini WTP.²³

Tabel 1. 3 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Opini BPK	Tahun 20--									
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	10	11	14	20	30	31	34	35	35	35
	25	24	21	15	5	4	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>

²³ “Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,” BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, diakses pada 1 November, 2022, <https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>.

Research gap melatarbelakangi pada penelitian ini yaitu penelitian dari I Gusti Ayu Gita Saraswati dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih tentang “Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif dan searah terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Denpasar.²⁴ Berbeda pada penelitian Tapi Rumondang Sari Siregar tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu” berdasarkan pengujian hipotesis, ditemukan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.²⁵ Penelitian dari Oktriana Arza, Yulia Syafitri, dan Delori Nancy Meyla tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang” berdasarkan pengujian hipotesis, ditemukan bahwa sumber daya manusia juga berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.²⁶

Penelitian dari I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan” dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Tangerang Selatan.²⁷ Sebaliknya, penelitian Sri Rahayu

²⁴ I Gusti Ayu Gita Saraswati dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, “Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi SDM, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 27, no. 3 (2019): 2268–92, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p23>.

²⁵ Tapi Rumondang Sari Siregar, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu.”

²⁶ Oktriana Arza, Yulia Syafitri, dan Delori Nancy Meyla, “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang,” *Pareso Jurnal* 3, no. 3 (2021): 519–42.

²⁷ I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem

dan Misni Erwati tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo” justru menemukan bukti lain bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD.²⁸

Penelitian dari Lestari dan Dewi tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” dengan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD di Kabupaten Bandung.²⁹ Penelitian dari Maryono dan Batara Daniel Bagana tentang “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang” menemukan bukti bahwa sistem pengendalian internal juga menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.³⁰

Tiga variabel dalam penelitian yang sudah disebutkan yakni kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern sebagian memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, ada juga yang tidak berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan replika

Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.”

²⁸ Sri Rahayu dan Misni Erwati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo.”

²⁹ Lestari dan Dewi, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.”

³⁰ Maryono dan Batara Daniel Bagana, “Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.”

dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Nyoman Budiasih³¹ yang melakukan penelitian di OPD Kota Denpasar dengan menggunakan variabel *good governance*, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern. Peneliti mengganti variabel *good governance* dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai kebaruan penelitian, didukung penelitian yang dilakukan I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka³² menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Tangerang Selatan. Penerapan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini juga merupakan saran dari penelitian terdahulu yang dilakukan Tapi Rumondang Sari Siregar.³³ Adanya penerapan pemanfaatan teknologi dalam penelitian ini dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan, dapat meminimalisasi kesalahan penyajian akun laporan keuangan, dan mampu menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, kebaruan penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori keagenan (*Agency Theory*) dan teori kegunaan keputusan (*Decision- Usefulness Theory*), yang dimana penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada yang sekaligus menggunakan dua teori tersebut dalam penelitiannya.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang tidak konsisten maka diperoleh hasil yang berbeda sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam dalam suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan**

³¹ I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, “Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan.”

³² I Wayan Mustika dan Lilik Handaya Eka, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan.”

³³ Tapi Rumondang Sari Siregar, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu.”

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang pemerintahan, terutama pada permasalahan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kudus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kudus guna meningkatkan penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai pelatihan intelektual dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan kualitas laporan keuangan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan dan sumber informasi atau masukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan peneliti susun :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar grafik.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab I sampai bab V memiliki keterikatan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan keterbatasan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang merupakan daftar dari semua kepustakaan atau semua literatur yang digunakan dalam skripsi dan lampiran-lampiran.